RENCANA KINERJA TAHUNAN

SEKRETARIAT UTAMA BNN

TAHUN 2021

KATA PENGANTAR

Dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Sekretariat Utama (Settama) BNN Tahun 2021 merupakan gambaran program kerja Settama BNN dalam 1 (satu) tahun mendatang yang dijabarkan dari Rencana Strategis Settama BNN 2020–2024 dan mengacu pada Rencana Kerja (Renja) BNN tahun 2021.

Dokumen RKT Settama BNN 2021 memuat sasaran, target kinerja, dan kebutuhan pendanaan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi kesekretariatan sebagai bagian dari upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan BNN.

Rencana kinerja program dan kegiatan pada RKT Settama BNN 2021 menjadi dokumen sumber bagi perumusan Perjanjian Kinerja Settama BNN Tahun 2021, yang akan digunakan sebagai acuan pelaksanaan program dan kegiatan kesekretariatan di tahun 2021.

Akhirnya, semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa Memberikan petunjuk dan bimbingan-Nya kepada kita untuk mewujudkan keberhasilan pencapaian kinerja sebagaimana yang telah kita rencanakan. Amin.

Jakarta, Desember 2020

Sekretaris Utama BNN

Drs. Dunan Ismail Isja, MM

BAB I
PENDAHULUAN

A. KONDISI UMUM

1. Permasalahan

   Settama BNN memiliki peran cukup strategis dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi BNN sebagai *leading sector* penanganan permasalahan narkoba melalui pemberian layanan berupa koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan BNN. Peran strategis tersebut menuntut kapasitas dan kapabilitas yang optimal dari unit-unit organisasi pelaksana tugas dan fungsi kesekretariatan di lingkungan Settama BNN.

   Sementara itu, sejalan dengan dinamika lingkungan strategis, isu dan permasalahan yang dihadapi oleh Settama BNN dalam menjalankan tugas dan fungsi kesekretariatan juga semakin kompleks. Adapun identifikasi isu dan permasalahan yang dihadapi Settama BNN sebagaimana termuat dalam Renstra Settama BNN 2020–2024 dan diperkirakan masih/akan terjadi dalam 1 (satu) tahun ke depan sebagai berikut:

   a. Isu Akuntabilitas

      Permasalahan menonjol dalam isu akuntabilitas di antaranya terkait mekanisme penurunan *(cascading)* kinerja organisasi kepada kinerja individu belum seluruhnya terumuskan dengan baik; serta sistem informasi pada beberapa tahapan penyelenggaraan SAKIP yang belum terbangun atau belum terintegrasi.

   b. Isu Organisasi dan Tata Kerja

      Permasalahan menonjol dalam isu organisasi dan tata kerja di antaranya terkait proses restrukturisasi organisasi hasil evaluasi kelembagaan yang belum terimplementasi; serta sistem kerja antara pejabat pimpinan tinggi pratama dan pejabat fungsional, sebagai

implikasi kebijakan penghapusan jabatan eselon III dan IV, belum terkelola baik.

c. Isu Manajemen Kepegawaian

Permasalahan menonjol dalam isu manajemen kepegawaian di antaranya terkait distribusi pegawai yang belum proporsional dan belum sepenuhnya mengacu kebutuhan organisasi; serta masih terdapat ketidaksesuaian *(mismatch)* antara kompetensi pegawai dan jabatan yang diduduki.

d. Isu Pengelolaan Keuangan

Permasalahan menonjol dalam isu pengelolaan keuangan di antaranya terkait masih terdapat pengelola keuangan dengan kompetensi kurang memadai; serta data sistem keuangan dan kepegawaian yang belum terintegrasi.

e. Isu Sarana dan Prasarana Perkantoran

Permasalahan menonjol dalam isu pengelolaan keuangan di antaranya terkait kondisi beberapa gedung BNN Provinsi dan BNN Kabupaten/Kota yang membutuhkan perbaikan dan/atau masih berstatus sewa/pinjam; serta kondisi beberapa sarana perkantoran yang kurang layak pakai dan memerlukan penggantian.

f. Isu Kehumasan

Permasalahan menonjol dalam isu pengelolaan keuangan di antaranya terkait ketersediaan infrastruktur kehumasan yang masih minim; serta minimnya Sumber Daya Manusia (SDM) bidang kehumasan pada satuan kerja vertikal BNN.

2. Hasil Evaluasi

Peran Settama BNN dalam memberikan dukungan layanan kesekretariatan telah menghasilkan capaian di tahun 2020 sebagai berikut:

a. Opini Laporan Keuangan

BNN meraih penghargaan pemerintah atas pencapaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk Laporan Keuangan TA 2019. BNN juga meraih penghargaan pemerintah atas perolehan opini WTP sebanyak 10 (sepuluh) kali

berturut-turut selama periode Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2010–2019.

b. Nilai Akuntabilitas Kinerja BNN

BNN memperoleh Nilai AKIP sebesar 65,32 dan tergolong dalam predikat ”B”, sesuai target dalam dokumen perjanjian kinerja (predikat ”B”). Hanya saja predikat ”B” memiliki rentang nilai >65–75 dan capaian BNN (masih) berada pada tahap awal rentang predikat tersebut. Nilai AKIP yang diperoleh BNN menunjukkan bahwa tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dibandingkan dengan capaian kinerjanya sudah cukup baik. Begitu pula dengan kualitas pembangunan budaya kinerja birokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan berorientasi hasil yang dinilai cukup baik.

Jika dibandingkan tahun 2019, perolehan Nilai AKIP BNN tahun 2020 mengalami peningkatan sebesar 1,32, namun belum cukup signifikan. Dibutuhkan upaya lebih keras untuk memperoleh predikat Nilai AKIP “A” (Sangat baik) di rentang nilai >75–85, terlebih Nilai AKIP berpredikat “AA” (Memuaskan) pada rentang nilai >85–100.

c. Indeks Reformasi Birokrasi (RB) BNN

BNN memperoleh Indeks RB sebesar 71,87 dengan kategori ”BB” (Baik), dan belum mencapai target 75,01 sebagaimana yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja. Kategori “BB” memiliki rentang nilai >70–80 dan capaian BNN (masih) berada pada tahap awal rentang predikat tersebut. Indeks RB yang diperoleh BNN menunjukkan bahwa BNN telah memenuhi karakteristik organisasi berbasis kinerja, namun belum mampu mewujudkan keseluruhan sasaran reformasi birokrasi baik secara instansional maupun di tingkat unit kerja.

Capaian ini juga belum mampu menembus ambang nilai minimal (75,01) yang menjadi syarat terpenuhinya tunjangan kinerja sebesar 80%.

d. Opini Kepercayaan Publik Terhadap BNN

BNN memperoleh Opini Kepercayaan Publik melalui hasil pengumpulan dan tabulasi data kuesioner jajak pendapat kepada masyarakat sebesar 85%, melampaui target yang ditetapkan dalam

perjanjian kinerja (80%). Hal tersebut mengindikasikan bahwa masyarakat menilai program dan kegiatan yang dijalankan oleh BNN telah sesuai mandat sehingga membentuk opini positif pada kiprah kelembagaan BNN.

Beberapa upaya untuk mempertahankan citra positif masyarakat terhadap BNN diantaranya dengan mengintensifkan publikasi kinerja kelembagaan di berbagai media, mengembangkan jejaring dengan media masa (cetak dan digital), serta melakukan pelatihan kehumasan terhadap SDM di satuan kerja vertikal BNN.

B. LANDASAN HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Lembaga;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional;
6. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
7. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 05 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional;
8. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 06 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan BNN Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 06 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Narkotika Nasional Tahun 2020–2024;
10. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 08 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Badan Narkotika Nasional;

11. Rencana Strategis Sekretariat Utama Badan Narkotika Nasional Tahun 2020–2024;
12. Rencana Kerja Badan Narkotika Nasional Tahun 2021.

BAB II
RENCANA KINERJA DAN KEBUTUHAN PENDANAAN
SEKRETARIAT UTAMA BNN
TAHUN 2021

Settama BNN menetapkan RKT 2021 sesuai arah kebijakan dan strategi yang termuat dalam Renstra Settama BNN Renstra Settama 2020–2024 dan dengan mempedomani Renja BNN Tahun 2021. RKT Settama BNN Tahun 2021 ini merupakan gambaran rencana program kerja Settama BNN dalam satu tahun mendatang bersama seluruh unit kerja vertikal. Adapun sasaran, target kinerja, dan kebutuhan pendanaan Settama BNN Tahun 2021 sebagai berikut:

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	TARGET KINERJA	KEBUTUHAN PENDANAAN
Program Dukungan Manajemen	**Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan BNN**	**Nilai Akuntabilitas Kinerja BNN (AKIP)**	**70**	**1.023.523.574**
		Indeks Kepuasan Penyelenggaraan Organisasi	**81**	
		Opini Kepercayaan Publik terhadap BNN	**70**	
Penyusunan dan Pengembangan Rencana Program dan Anggaran BNN	Meningkatnya proses manajemen kinerja secara efektif dan efisien	Nilai Kinerja Anggaran BNN	82	19.899.471
Pengembangan Organisasi, Tatalaksana, dan Sumber Daya Manusia	Meningkatnya pengelolaan SDM, organisasi dan tatalaksana yang efektif	Indeks Kepuasan Penyelenggaraan Layanan Kepegawaian	3,2	24.367.836
		Persentase penilaian atas efektivitas penataan tatalaksana	78	
Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan	Meningkatnya tata kelola administrasi keuangan yang sesuai prosedur	Nilai kualitas laporan keuangan satuan kerja	100	572.297.700
		Indeks Kepatuhan Pembayaran Belanja Pegawai	4	
Penyelenggaraan Ketatausahaan, Rumah Tangga dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana	Meningkatnya pelayanan umum secara maksimal	Indeks Kualitas Penyelenggaraan Ketatausahaan	3,1	410.999.921
		Indeks Kualitas Pengadaan dan Pengelolaan Barang/ Jasa	3,1	

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	TARGET KINERJA	KEBUTUHAN PENDANAAN
Penyelenggaraan Kehumasan dan Keprotokolan	Meningkatnya fungsi layanan publikasi kelembagaan dan keprotokoleran yang optimal	Indeks Layanan Kehumasan	3,5	15.858.117
		Persentase Tingkat Kepuasan Pelayanan Keprotokoleran	85	

Indeks RB BNN dan Opini BPK Atas Laporan Keuangan BNN yang merupakan Indikator Kinerja Program (IKP) Settama BNN pada periode 2015–2020, tidak lagi menjadi IKP Settama BNN di periode 2020–2024. Hal tersebut didasari atas pertimbangan:

1. Indeks RB BNN terdiri dari 8 (delapan) area perubahan yang beberapa diantaranya diintervensi oleh pelaksanaan tugas dan fungsi unit kerja di luar Settama BNN sehingga Settama tidak memiliki kontrol penuh terhadap kinerjanya. Indeks RB BNN direposisi menjadi indikator kinerja sasaran strategis (IKSS) yang diampu oleh Kepala BNN;
2. Opini BPK Atas Laporan Keuangan BNN direposisi menjadi IKP Inspektorat Utama (Ittama) BNN dikarenakan pelaksanaan reviu dan penjaminan mutu terhadap Laporan Keuangan BNN menjadi bagian dari tugas dan fungsi Ittama BNN.

BAB III
PENUTUP

Dokumen RKT Settama BNN Tahun 2021 menggambarkan target kinerja dan anggaran kumulatif bidang kesekretariatan dari seluruh unit organisasi pusat dan vertikal di lingkungan BNN. RKT Settama BNN Tahun 2021 ini akan menjadi dokumen sumber bagi penetapan perjanjian kinerja unit organisasi di lingkungan Settama BNN untuk tahun 2021. Dengan demikian, dokumen RKT Settama BNN Tahun 2021 juga menjadi acuan bagi pelaksanaan program dan kegiatan bidang kesekretariatan di tahun anggaran 2021.

Demikian RKT Settama BNN Tahun 2021 ini disusun sebagai bagian dari kesinambungan proses mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan BNN.